

## Pemberontakan "Gerakan M23" di Republik Demokratik Kongo (*"M23 Mouvement" Rebellion at Democratic Republic of Congo*)

Doddy Yasman, Drs. Abu Bakar Eby Hara, M.A, PhD, Drs. Djoko Susilo, M. Si.  
Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember  
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121  
E-mail: [DPU@unej.ac.id](mailto:DPU@unej.ac.id)

### Abstrak

Sejak mendapatkan kemerdekaan dari Belgia pada tahun 1960, Selalu terjadi konflik antar etnis maupun konflik politik di Republik Demokratik Kongo (DRC). Konflik-konflik yang terjadi dalam bentuk perang antar etnis, Pemberontakan, kudeta militer, dan gangguan keamanan yang dilakukan oleh milisi-milisi bersenjata terhadap masyarakat. Konflik yang baru saja terjadi adalah pemberontakan "Gerakan M23" di wilayah timur DRC khususnya di provinsi North Kivu. Pemberontakan ini telah berhasil menguasai ibu kota provinsi North Kivu yaitu kota Goma. Pemberontak "Gerakan M23" tidak hanya menyerang pasukan angkatan bersenjata Republik Demokratik Kongo (FADRC), tetapi juga menyerang pasukan penjaga perdamaian dan keamanan perserikatan bangsa-bangsa (PBB) yang tergabung dalam misi yang bernama " Mission de l'Organisation des Nation Unies pour la Stabilisation en Republique DR.Congo " (MONUSCO). Munculnya pemberontakan M23 di timur DRC, menarik kembali perhatian Internasional di daerah konflik yang kompleks tersebut. Meskipun angkatan bersenjata DRC sudah melakukan tindakan penumpasan dengan resistensi yang kuat, kekuatan kelompok ini terus berkembang dengan melakukan koalisi dengan kelompok bersenjata lainnya di wilayah tersebut dan menimbulkan kekalahan yang memalukan bagi angkatan bersenjata negara itu.

**Kata Kunci: Gangguan Keamanan, Konflik, Pemberontakan, Perang,**

### Abstract

*Since getting independence from Belgium in 1960 , is always a conflict between ethnic and political conflict in the Democratic Republic of Congo ( DRC ) . Conflicts that occur in the form of inter- ethnic war , rebellion , military coup , and security threats by armed militias against the people . Conflict that has just happened is rebellion " M23 Movement " in eastern DRC , especially in the province of North Kivu . This rebellion has successfully mastered the North Kivu provincial capital is the city of Goma . Rebels " M23 Movement " is not only attacking the armed forces of the Democratic Republic of Congo ( FADRC ) , but also attacking peacekeepers and security united nations ( UN ) is incorporated in the mission called " Mission de l' Organisation des Nations Unies pour la Stabilisation en Republique DR.Congo " ( MONUSCO ) . The emergence of M23 rebellion in eastern DRC , retract International attention on the complex conflict areas . Although the DRC armed forces have done crackdown with strong resistance , the power of this group continues to grow by a coalition with other armed groups in the region and lead to a humiliating defeat for the country's armed forces .*

**Keywords : Conflic, Rebellion, Security threats, War**

### Pendahuluan

Pemberontakan M23 tidak bisa dilepaskan dari pemberontakan yang terjadi terdahulu sebelumnya di DRC. Karena pada dasarnya pemberontakan M23 merupakan lanjutan dan bagian dari pemberontakan terdahulu yang terjadi di DRC. Hal tersebut bisa dilihat dari para elit dan tokoh-tokoh yang ada di balik gerakan pemberontakan ini, mereka merupakan para elit dan tokoh-tokoh dari gerakan pemberontakan yang terjadi sebelumnya. Pembuktian lain juga bisa dilihat dari tujuan yang ingin dicapai oleh kelompok gerakan yang ada dan terlibat dalam pemberontakan tersebut sama dengan tujuan yang ingin dicapai oleh kelompok gerakan dari pemberontakan sebelumnya. M23 bukanlah sebuah fenomena baru di negeri

itu. M23 sendiri mirip dengan para pendahulunya yaitu pemberontakan CNDP (National Congress for the Defense of the People) dan RCD (Rally for Congolese Democracy), pemberontakan ini dipimpin oleh sebagian besar elit militer yang berasal dari suku Tutsi.<sup>[1]</sup>

Konflik yang terjadi di wilayah timur DRC khususnya North Kivu tidak bisa dilepaskan dari sejarah konflik kesukuan yang terjadi antara Hutu dan Tutsi yang pernah terjadi di Rwanda. Kedua negara ini yaitu Rwanda dan DRC merupakan dua negara yang saling bertetangga dan memiliki wilayah perbatasan bersebelahan langsung antar kedua negara. Kondisi geografis ini sangat memungkinkan terjadinya migrasi antar penduduk kedua negara di wilayah ini. Sejak dahulu bahkan sebelum masa penjajahan terjadi di benua Afrika dan kedua negara, telah terjadi migrasi antar

penduduk dan perpindahan suku di wilayah ini. Sejak tahun 1996, daerah sekitar Goma, terutama daerah pegunungan Masisi dan Bwito dihuni oleh kebanyakan dari keturunan para imigran dari Rwanda dan telah memiliki hubungan yang erat dengan para elit RPF (Front Patriotik Rwanda) di Kigali.[2]

Pemberontakan (M23) ini, juga ditenggarai mendapat dukungan dari Negara tetangga Republik Demokratik Kongo yaitu Republik Rwanda, hal ini dikuatkan dengan adanya temuan dari investigasi yang dilakukan oleh Dewan Keamanan (DK) perserikatan bangsa-bangsa (PBB).

Temuan ini menyebutkan bahwa Republik Rwanda telah memberikan bantuan logistik dan persenjataan serta milisi-milisi militer yang berasal dari Republik Rwanda, bantuan ini menyebabkan bertambahnya kekuatan militer yang dimiliki oleh anggota gerakan pemberontakan tersebut serta menyebabkan kesulitan besar bagi pasukan angkatan bersenjata Republik Demokratik Kongo (FADRC) dan pasukan penjaga perdamaian dan keamanan multinasional Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dalam meredam pemberontakan tersebut.[3] Inti dari krisis itu sendiri adalah sebuah masalah yang melibatkan Rwanda, elit lokal dan pemerintahan DRC di Kinshasha.

Lebih dari setahun M23 melakukan pemberontakan, tidak ada solusi konkrit untuk menghentikan pertikaian, meskipun pada bulan September 2012 Kinshasha memulai kebijakan untuk melakukan kontak dialog dengan “Gerakan M23”. Namun, Komandan tentara DRC terus-menerus untuk tetap melakukan operasi militer meskipun operasi militer ini selalu gagal. Organisasi donor Internasional pun enggan untuk menambahkan komitmen dan biaya perdamaian di DRC. Sampai saat ini konflik terus berlanjut di timur DRC.[4]

### Metode Penelitian

Untuk mendapat hasil penelitian yang baik, harus menggunakan proses berfikir yang baik pula. Tahap analisis data ditujukan untuk mendapatkan kesimpulan yang objektif dan ilmiah. Dalam penelitian ini, metode analisis data yang digunakan oleh penulis adalah metode deskriptif. Dalam mengkaji masalah ini, penulis menggunakan analisis data kualitatif karena data yang diperoleh tidak dapat diukur secara statistik-matematis. Data kualitatif hanya bersifat menggambarkan, menjelaskan, dan memaparkan suatu fenomena secara *real* dan apa adanya. Dalam melakukan pembahasan terhadap temuan-temuan penelitian, peneliti harus mencermati secara kritis dan hati-hati terhadap prospek teoritis yang digunakan, sehingga nantinya dihasilkan suatu kesimpulan yang dapat membuktikan hipotesis yang ada.

Sedangkan teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori konflik politik dan konsep pemberontakan. Konflik politik dapat diartikan sebagai perbedaan pendapat, persaingan, dan pertentangan di antara sejumlah individu, kelompok, ataupun organisasi dalam upaya untuk mendapatkan atau mempertahankan sumber-sumber dari keputusan yang dibuat dan dilaksanakan pemerintah. Adapun yang dimaksud dengan pemerintah meliputi lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif.[5]

Pada dasarnya konflik politik disebabkan oleh dua hal. Konflik politik yang mencakup kemajemukan horisontal dan kemajemukan vertikal. Adapun yang dimaksud dengan kemajemukan horisontal adalah struktur masyarakat yang majemuk secara kultural sehingga menimbulkan beberapa perbedaan, seperti perbedaan agama, ideologi, ras; dan majemuk secara sosial dalam arti perbedaan pekerjaan dan profesi, seperti petani, buruh, pedagang, pengusaha, pegawai negeri sipil, militer, wartawan, dokter, dan ulama; dan dalam arti perbedaan karakteristik tempat tinggal, seperti desa dan kota.[6]

Sedangkan, kemajemukan vertikal adalah struktur masyarakat yang terpolarisasikan menurut pemilikan kekayaan, pengetahuan, dan kekuasaan. Kemajemukan vertikal dapat menimbulkan konflik sebab sebagian besar masyarakat yang tidak memiliki atau hanya memiliki sedikit kekayaan, pengetahuan, dan kekuasaan akan memiliki kepentingan yang bertentangan dengan kelompok kecil masyarakat yang mendominasi ketiga sumber pengaruh tersebut. Jadi, distribusi kekayaan, pengetahuan, dan kekuasaan yang tidak merata merupakan penyebab utama timbulnya konflik politik.[7]

Kelompok konflik politik dikelompokkan menjadi dua tipe, yaitu konflik positif dan konflik negatif. Adapun yang dimaksud dengan konflik positif adalah konflik yang tak mengancam eksistensi sistem politik, yang biasanya disalurkan lewat mekanisme penyelesaian konflik yang disepakati bersama dalam konstitusi. Mekanisme yang dimaksud ialah lembaga-lembaga demokrasi, seperti partai politik, badan-badan perwakilan rakyat, pengadilan, pemerintah, pers, dan forum-forum terbuka yang lain. Sebaliknya, konflik negatif adalah konflik yang dapat mengancam eksistensi sistem politik yang biasanya disalurkan melalui cara-cara nonkonstitusional, seperti kudeta, separatisme, terorisme, dan revolusi.[8]

Menurut Paul Conn, situasi konflik pada dasarnya dibedakan menjadi konflik menang-kalah (*zero-sum conflict*) dan konflik menang-menang (*non zero-sum conflict*). Konflik menang-kalah ialah situasi konflik yang bersifat antagonistik sehingga tidak memungkinkan tercapainya suatu kompromi di antara pihak-pihak yang terlibat konflik. Ciri struktur konflik ini, yaitu tidak mungkin mengadakan kerjasama, hasil kompetisi akan dinikmati oleh pemenang saja (pihak pemenang akan mendapatkan semuanya, sedangkan pihak yang kalah akan kehilangan semuanya) dan yang dipertaruhkan biasanya menyangkut hal-hal yang dianggap prinsipil, seperti harga diri, iman kepercayaan, masalah hidup atau mati, dan jabatan penting pemerintahan. Contoh dari konflik ini adalah perbedaan ideologi anantara pihak-pihak yang bertikai.[9]

Konflik menang-menang ialah situasi konflik di mana pihak-pihak yang terlibat dalam konflik masih mungkin untuk mengadakan kompromi dan bekerja sama sehingga semua pihak akan mendapatkan bagian dari konflik tersebut. Ciri struktur konflik ini, yaitu kompromi dan kerjasama, hasil kompetisi akan dinikmati oleh kedua pihak tetapi tidak secara maksimal. Masalah yang dipertaruhkan dalam konflik ini biasanya bukan hal-hal yang prinsipil, tetapi bukan pula hal yang tidak penting. Namun, justru hal itu dianggap

penting, maka diadakan dialog, kompromi, dan kerja sama yang menguntungkan kedua belah pihak.<sup>[10]</sup>

Pemberontakan M23 terjadi karena pertentangan antara pihak pemberontak dengan pemerintah DRC mengenai mekanisme dan pelaksanaan perjanjian 23 maret 2009. Pertentangan ini juga meliputi pembagian kekuasaan antara pihak yang berseteru dalam konflik sebelumnya serta kelanjutan nasib mantan pemberontak yang berintegrasi dengan pemerintah dan nasib suku Tutsi yang ada di DRC secara keseluruhan. Pemerintah dinilai telah menyimpang dan tidak melaksanakan kesepakatan damai tersebut serta mengabaikan para pengungsi suku Tutsi yang merupakan suku minoritas yang menjadi alasan utama dari perjuangan pemberontakan sebelumnya.

### Hasil dan Pembahasan

Kelompok "Gerakan M23" berdiri pada tanggal 4 april 2012. Kelompok ini didirikan oleh 300 orang para mantan anggota CNDP yang telah berintegrasi ke dalam angkatan bersenjata DRC (FADRC) dan melakukan desersi. Karena pemerintah DRC dibawah pimpinan Presiden Joseph Kabila dinilai telah melanggar perjanjian damai tanggal 23 Maret 2009 yang berbunyi sebagai berikut :

1. CNDP akan mengintegrasikan pasukannya kedalam angkatan bersenjata DRC (FADRC) dan kepolisian dan CNDP sendiri akan mengubah diri menjadi partai politik.
2. Pejabat Administratif CNDP akan di angkat menjadi pejabat Administratif di DRC dan posisi menteri akan dibagi dengan anggota CNDP.
3. Pemerintah akan menghidupkan kembali pembicaraan dengan komisi tinggi PBB untuk pengungsi (UNHCR) dan Negara yang bertetangga dengan DRC untuk memulangkan para pengungsi khususnya pengungsi Tutsi.
4. Pemerintah tidak akan memindah tugaskan petugas CNDP yang sudah berintegrasi dari wilayah North Kivu.

Para pemberontak menilai Pemerintah DRC tidak menjalankan perjanjian yang telah disepakati tersebut. Karena pada kenyataannya mereka diperlakukan dengan tidak adil didalam tubuh angkatan bersenjata DRC. Seperti yang disampaikan oleh salah satu anggota mantan CNDP<sup>[11]</sup>, *"The soldiers were tired of seeing their commanders get rich and not give them anything. Why risk your lives for commanders you don't believe in?"* (Para tentara telah lelah melihat para komandan mendapatkan kekayaan dan tidak memberikan mereka apa-apa. Mengapa resiko hidup anda untuk Komandan yang tidak anda percaya?).

Para mantan anggota CNDP mendapatkan gaji yang lebih sedikit dan perlakuan yang tidak sama dibandingkan dengan anggota pasukan FADRC lainnya yang bukan mantan anggota CNDP. Selain itu, mereka juga tidak diberikan jabatan dalam angkatan bersenjata DRC.<sup>[12]</sup> Selama jalannya pemerintahan setelah perjanjian ditandatangani bahkan setelah beberapa kali pergantian posisi menteri di dalam kabinet pemerintahan presiden Joseph Kabila tidak satupun dari para mantan anggota CNDP yang menduduki jabatan posisi menteri. Para mantan anggota CNDP hanya di masukkan dalam pemerintahan

wilayah dan disebar ke seluruh penjuru DRC.<sup>[13]</sup> Dalam konteks ini pemerintah sudah melanggar dua poin dalam perjanjian ini yaitu poin ke-2 dan ke-4.

Mengenai masalah pengungsi pemerintah DRC sudah melakukan dialog dengan komisi tinggi PBB untuk pengungsi (UNHCR) dan negara-negara tetangganya yang menampung para pengungsi tersebut, bahkan sudah memulangkan sebagian pengungsi kembali ke DRC. Namun dalam pelaksanaan lanjutan dari kebijakan ini pemerintah DRC tidak memberikan kepastian mengenai lahan tempat tinggal dan kelangsungan hidup dari para pengungsi tersebut, sehingga para pengungsi kembali kepada tempat-tempat pengungsian semula dan membuat kelompok pemberontak menilai bahwa pemerintahan Kinshasha tidak serius dalam menangani masalah pengungsi.<sup>[14]</sup>

Ketegangan semakin meningkat ketika pemerintah DRC mencoba untuk melakukan penyebaran tugas terhadap para anggota angkatan bersenjata yang merupakan para mantan anggota CNDP dari North Kivu ke berbagai wilayah di DRC.<sup>[15]</sup> Hal ini dilakukan oleh pemerintahan Joseph Kabila dengan tujuan untuk menguji kesetiaan mereka terhadap pemerintah dan sebagai sarana untuk mencegah tindakan memperkaya diri sendiri bagi para petinggi militer di North Kivu yang merupakan mantan anggota CNDP. Ketegangan juga semakin diperparah oleh hasil pemilu yang dinilai banyak mengandung kecurangan didalamnya, yang menghantarkan partai yang dipimpin oleh presiden Joseph Kabila menang mutlak dan menjadikannya kembali menduduki jabatan presiden DRC. Hasil pemilu ini membuat para mantan anggota CNDP tidak puas karena partai yang mereka dirikan mengalami kekalahan sehingga tidak satu pun dari mantan anggota CNDP yang berhasil meraih kursi di parlemen maupun masuk dalam jajaran pemerintahan DRC.<sup>[16]</sup>

Pembelotan terjadi pertama kali terjadi setelah pemilu dilaksanakan ketika pihak pemerintah DRC mencoba menangkap para mantan pemimpin CNDP dan menyerahkan mereka kepada mahkamah Internasional (ICC) atas tuduhan pelanggaran HAM yang terjadi di North Kivu dan Ituri selama masa pemilu serta perekrutan tentara anak selama masa konflik.<sup>[17]</sup>

Pembelotan ini sebenarnya bisa diselesaikan setelah adanya perjanjian antara pasukan yang membelot dengan pemerintah DRC dengan dimediasi oleh pemerintah Rwanda. Pada kelangsungannya perjanjian ini tidak berjalan sebagai mana mestinya karena perjanjian ini kembali dilanggar oleh pemerintah DRC di bawah pimpinan Presiden Joseph Kabila. Ketika Joseph Kabila mengunjungi Goma, ia bersikeras menyampaikan bahwa para pemberontak telah mencoreng nama baik militer negara itu dan mereka harus di hukum untuk menegakkan azas keadilan.<sup>[18]</sup>

Perjanjian itu sendiri berisi tentang adanya jaminan kesejahteraan yang setara antara pasukan mantan CNDP dengan pasukan FADRC yang bukan mantan anggota CNDP, serta Ntaganda dibebaskan dari segala tuntutan dan diberikan kebebasan untuk tinggal dan menempati tanah pertaniannya di Masisi, dan dibentuk sebuah komisi integrasi yang akan mengurus pasukan pembelot lainnya yang masih di pedalaman dan akan bergabung kembali dengan angkatan bersenjata DRC.<sup>[19]</sup>

Gagalnya perjanjian ini membuat Pemerintah Rwanda dan pasukan pemberontak geram, pasukan yang telah bergabung kembali dengan angkatan bersenjata DRC (FADRC) akhirnya kembali melakukan pembelotan dipimpin oleh kolonel Sultangi Makenga. Pasukan ini berjumlah 300 orang dan menyeberang ke Rwanda untuk bergabung dengan Ntaganda. Kelompok ini memproklamkan gerakan dengan nama "Gerakan M23" pada tanggal 4 April 2012 serta mengumumkan berakhirnya perjanjian damai 23 Maret 2009.<sup>[20]</sup>

Gagalnya perjanjian damai 23 maret 2009 menandakan dimulainya babak baru sebuah konflik politik antara pihak pemerintah DRC dengan pemberontak "Gerakan M23" yang menyebabkan konflik dan kekerasan kembali pecah di timur DRC. Pihak pemberontak menyatakan kesungguhannya dalam menumbangkan pemerintahan presiden Joseph Kabila yang memimpin DRC saat ini. Hal ini disampaikan oleh salah seorang juru bicara pemberontak Kolonel Vianney Kazarama setelah pemberontak M23 berhasil merebut Ibu kota provinsi North Kivu, kota Goma.

"Perjalanan untuk membebaskan Kongo telah dimula. Kami tengah bersiap untuk bergerak ke Bukavu dan kemudian ke Kinshasha. Apakah anda bersedia untuk bergabung dengan kami?"<sup>[21]</sup>

Keterlibatan Rwanda dalam pemberontakan "Gerakan M23" telah didokumentasikan oleh tim khusus PBB,<sup>[22]</sup> kesimpulan hasil investigasi tim ini telah di konfirmasi kepada lembaga HAM Internasional, MONUSCO, dan sedikitnya tiga kedutaan besar di Kigali melalui Investigasi Internal. Penelitian untuk laporan Investigasi ini juga memuat wawancara dengan selusin pemberontak M23, saksi mata lokal, dan 15 petugas mantan CNDP yang masih bergabung dengan tentara DRC.

Pada mulanya Pemerintah Rwanda melakukan intervensi terhadap kegagalan pemberontakan sebelumnya, memperbaiki hubungan antara Ntaganda dan Makenga, dan mendorong Laurent Nkunda untuk mengerahkan Makenga dan petugas lainnya membina hubungan dekat dengan Pemerintah Rwanda. Kigali juga terlibat dalam mobilisasi pemimpin kelompok bersenjata lainnya, tuan rumah dari puluhan kali pertemuan-pertemuan Gisenyi, Ruhengeri dan Kigali mulai dari Mei 2012 dan seterusnya. Pejabat tinggi keamanan Rwanda sering berbicara selama pertemuan ini.<sup>[23]</sup>

Salah seorang peserta pertemuan ini<sup>[24]</sup> mengatakan : *"They told us that Kinshasha would never do anything for us. That now was the time to finish what we had tried to begin with the RCD and the CNDP"* (Mereka mengatakan kepada kami bahwa Kinshasha tidak akan pernah melakukan apa-apa untuk kami. Bahwa sekarang itu adalah waktu untuk menyelesaikan apa yang sudah kita coba mulai dengan RCD dan CNDP).

Pada fase awal dimulainya pemberontakan, "Gerakan M23" hanya memiliki sekitar 300 sampai dengan 700 pasukan. Pasukan ini hanya memiliki senjata yang mereka kumpulkan di Masisi dan Bukavu. Pada bulan Juni 2012 mereka kembali muncul dengan persenjataan berat dan memiliki banyak amunisi yang mereka gunakan untuk tiga kali menyerang pasukan tentara Kongo. Rwanda

menyediakan bantuan yang sangat penting termasuk bantuan persenjataan, amunisi, perawat medis, dan pengerahan kontribusi pasukan serta politisi. Kontribusi pasukan Rwanda merupakan kunci sukses serangan M23 seperti di Bunagana dan Rutshuru.<sup>[25]</sup> Dengan kekuatan yang semakin besar pemberontak M23 akhirnya bisa merebut kota Goma yang merupakan Ibu kota provinsi North Kivu dan merebut bandara Internasional Goma yang merupakan markas besar pasukan keamanan PBB (MONUSCO) di daerah Timur DRC tanpa perlawanan berarti.

Barbara Plett dari PBB mengatakan bahwa laporan terakhir kelompok tenaga ahli dari Dewan Keamanan PBB memiliki data yang detail tentang keterlibatan Rwanda.<sup>[26]</sup> Dalam laporan itu terdapat keterangan bahwa para pemimpin M23 menerima perintah langsung dari staf menteri pertahanan Rwanda, Jenderal Charles Kayunga. Sang Jenderal bertindak berdasarkan instruksi dari menteri pertahanan Rwanda, Jenderal James Kabarebe. Dalam laporan itu juga menyebutkan bahwa Jenderal Bosco Ntaganda mengendalikan pemberontakan di lapangan. Sementara itu, Kolonel Sultangi Makenga bertanggungjawab atas koordinasi dengan kelompok-kelompok sekutu mereka. Namun laporan itu mengatakan bahwa secara *de facto* rantai komando M23 berujung pada menteri pertahanan Rwanda.

### Kesimpulan dan Saran

Pemberontakan M23 terjadi karena pertentangan antara pihak pemberontak "Gerakan M23" dengan Pemerintah DRC mengenai pelaksanaan perjanjian 23 maret 2009. Pertentangan ini meliputi pembagian kekuasaan antara pihak yang berseteru dalam konflik yang terjadi antara Pemerintah DRC dengan pihak pemberontak sebelumnya serta kelanjutan nasib mantan pemberontak yang berintegrasi dengan pemerintah dan nasib suku Tutsi yang ada di DRC secara keseluruhan karena pemberontakan "Gerakan M23" merupakan hasil evolusi dari gerakan pemberontakan terdahulu yang terjadi di DRC. Pemerintah DRC dinilai telah menyimpang dan tidak melaksanakan kesepakatan damai perjanjian 23 Maret 2009 serta mengabaikan para pengungsi suku Tutsi yang merupakan suku minoritas yang menjadi alasan utama dari perjuangan pemberontakan terdahulu sebelum pemberontakan "Gerakan M23". Pertentangan ini menimbulkan sebuah konflik politik diantara kedua belah pihak.

Pemberontakan "Gerakan M23" tidak bisa dilepaskan dari pemberontakan yang terjadi terdahulu sebelumnya di DRC. Karena pada dasarnya pemberontakan ini merupakan lanjutan dan bagian dari pemberontakan terdahulu yang terjadi di DRC. Hal ini bisa dilihat dari para elit dan tokoh-tokoh yang ada di balik pemberontakan ini, mereka merupakan para elit dan tokoh-tokoh dari pemberontakan yang terjadi sebelumnya. Pembuktian lain juga bisa dilihat dari tujuan yang ingin dicapai oleh kelompok gerakan yang ada dan terlibat dalam pemberontakan tersebut sama dengan tujuan yang ingin dicapai oleh kelompok gerakan dari pemberontakan sebelumnya.

M23 menjadi suatu fokus perhatian masalah bagi para diplomat dan media global Internasional. Namun, sebagai bagian dari kejadian yang terdahulu di DRC, M23 bukanlah

sebuah fenomena baru di negeri itu. M23 sendiri mirip dengan para pendahulunya yaitu CNDP dan RCD, pemberontakan ini dipimpin oleh sebagian besar elit militer yang berasal dari suku Tutsi. Suku Tutsi merupakan suku minoritas di DRC, tragedi genosida yang terjadi di Rwanda juga berimbas kepada suku Tutsi yang ada di DRC. Mereka kerap mendapatkan perlakuan diskriminasi dan penganiayaan dari suku lainnya di DRC. Keadaan ini diimbangi dengan lemahnya penegakan hukum dan perlindungan keamanan di DRC. Pemerintah telah dinilai gagal dalam memberikan jaminan keamanan dan penegakan hukum terhadap masyarakat khususnya suku Tutsi. Keadaan ini menjadikan tingkat diskriminasi dan penganiayaan terhadap suku Tutsi semakin meningkat. Ketakutan yang tumbuh dalam masyarakat khususnya suku Tutsi yang ada di Timur DRC merupakan suatu akumulasi tekanan yang terjadi atas diskriminasi terhadap suku Tutsi sebagai suku minoritas yang ada di DRC selama ini. Akumulasi tekanan ini menyebabkan ketidakpuasan dan kekecewaan terhadap pemerintah DRC yang akhirnya mendorong munculnya suatu upaya perlawanan yang diaktualisasikan dalam suatu pemberontakan terhadap pemerintah DRC.

Dalam kasus Pemberontakan M23 di DRC dapat diketahui bahwa mayoritas anggota pemberontak adalah orang-orang yang berasal dari suku Tutsi DRC yang selama ini merasakan adanya diskriminasi terhadap mereka baik yang mereka terima dari perlakuan masyarakat, maupun oleh pemerintah dan negara. Diskriminasi ini telah menimbulkan suatu gejolak sosial di DRC dan menjadi suatu alasan pembenaran munculnya konflik ditengah masyarakat. Keadaan ini semakin diperparah dengan tidak adanya kepastian hukum dan keamanan di DRC. Sikap pemerintah DRC yang tidak mampu memberikan kepastian hukum dan menjaga keamanan di masyarakat menyebabkan terjadinya aksi separatisme dan pemberontakan terhadap Pemerintah DRC sebagai pelampiasan kemarahan dan kekecewaan yang mereka alami.

Pemberontakan "Gerakan M23" juga dipengaruhi dengan adanya keterlibatan Republik Rwanda dalam mendukung pemberontakan "Gerakan M23" di DRC dengan cara menyediakan bantuan yang sangat penting termasuk bantuan persenjataan, amunisi, perawat medis, dan pengerahan kontribusi pasukan serta politisi. Inti dari krisis itu sendiri adalah sebuah masalah yang melibatkan Rwanda, elit lokal dan pemerintahan DRC di Kinshasha. Sejak tahun 1996, daerah sekitar Goma, terutama daerah pegunungan Masisi dan Bwito dihuni oleh kebanyakan dari keturunan para imigran dari Rwanda dan telah memiliki hubungan yang erat dengan para elit RPF (Front Patriotik Rwanda) di Kigali.

### Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih atas segala kritik dan saran yang telah diberikan untuk menyelesaikan penelitian ini. Dalam proses penyelesaian penelitian ini tentu saja terdapat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember;

Drs. Supriyadi, M.Si., selaku Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional. Bapak Drs. Abu bakar Eby Hara, M.A, P.hD., selaku Dosen Pembimbing Utama; Drs. Djoko Susilo, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Kedua penulis. Selain itu penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh civitas akademika di jurusan Ilmu Hubungan Internasional dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

### Daftar Pustaka/Rujukan

- [1]Stearns Jason, 2012. *From CNDP to M23 The Evolusion of an Armed Movement in Eastern Congo* . Nairobi: Rift Valley Institute.hal.52
- [2] *Ibid*.hal.52
- [3] Kompas, 23 November 2012.
- [4] *Ibid*.hal.53
- [5] *Ibid*, hal 151
- [6] *Ibid*, hal 151-152
- [7] *Ibid*, hal 151-152
- [8] *Ibid*, hal 153
- [9] *Ibid*, hal 154
- [10] *Ibid*, hal 154
- [11] *Ibid*.hal.43
- [12]Pasca Rebut Goma, Pemberontak Kongo Siap "Bebaskan"Negara.Diaksesdari:[http://www.analisadaily.com/news/read/2012/11/22/89148/pasca\\_rebut\\_goma\\_pemberontak\\_kongo\\_nyatakan\\_siap\\_bebaskan\\_negara](http://www.analisadaily.com/news/read/2012/11/22/89148/pasca_rebut_goma_pemberontak_kongo_nyatakan_siap_bebaskan_negara), diakses pada tanggal 21 Maret 2013.
- [13]Stearns Jason, 2012. *From CNDP to M23 The Evolusion of an Armed Movement in Eastern Congo* . Nairobi: Rift Valley Institute.op.chit.hal.42
- [14] *Ibid*.hal.43
- [15] *Ibid*.hal.40
- [16] *Ibid*.hal.40
- [17] *Ibid*.hal.44
- [18] *Ibid*.hal.44
- [19] *Ibid*.hal.44
- [20] *Ibid*.hal.45
- [21]PascaRebutGoma,PemberontakKongoSiap"Bebaskan" Negara.Diaksesdari:[http://www.analisadaily.com/news/read/2012/11/22/89148/pasca\\_rebut\\_goma\\_pemberontak\\_kongo\\_nyatakan\\_siap\\_bebaskan\\_negara](http://www.analisadaily.com/news/read/2012/11/22/89148/pasca_rebut_goma_pemberontak_kongo_nyatakan_siap_bebaskan_negara),diakses pada tanggal 21 Maret 2013.
- [22]Dewan Keamanan PBB mengancam Pemberontak M23 .diaksesdari:<http://www.indonesian.newsbom.com/world/161791.html>, diakses tanggal 23 february 2013.

[23] Stearns Jason, 2012. *From CNDP to M23 The Evolusion of an Armed Movement in Eastern Congo* . Nairobi: Rift Valley Institute.hal.56.op cit

[24] *Ibid*.hal.57

[25] *Ibid*.hal.47

[26] Rwanda dan Uganda dituduh dukung pemberontak di Kongo.diaksesdari:<http://www.berita99.com/berita/2665/iklan.php?url=www.klikindonesia.org>.diakses tanggal 7 juni 2013.

